

TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21Yayang¹, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban², St Nurfadhillah³, Irsyad Dahri⁴

Faculty of social Science and Law, Universitas Negri Makassar, Indonesia

E-mail: y0908636@gmail.com Johnfhsilaban06@gmail.com dillaaeqeela@gmail.com
irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, komputasi awan, dan infrastruktur siber telah mengubah cara negara menjalin, memelihara, dan mengelola hubungan diplomatik. Artikel ini mengkaji teknologi dalam dua kedudukan yang saling berkaitan. Pertama, teknologi sebagai instrumen diplomasi, yaitu alat yang dipakai diplomat dan kementerian luar negeri untuk berkomunikasi, membangun citra, dan menegosiasikan kepentingan. Kedua, teknologi sebagai arena dan objek diplomasi, yaitu isu yang dinegosiasikan, diperebutkan, dan diatur antarnegara melalui tata kelola internet, rantai pasok semikonduktor, standar teknis, keamanan siber, dan tata kelola kecerdasan buatan.

Dengan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka sistematis dan analisis tematik atas studi kasus terpilih, artikel ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, teknologi memperluas jangkauan dan kecepatan diplomasi, tetapi juga menambah risiko disinformasi, pengawasan, dan eskalasi yang tidak terkendali. Kedua, teknologi telah menjadi sumber daya kekuasaan baru sehingga persaingan antarnegara kini berlangsung melalui standar, ekosistem, dan rantai nilai, selain melalui senjata dan perdagangan. Ketiga, negara menengah dan negara berkembang seperti Indonesia memiliki ruang untuk berperan melalui diplomasi multilateral, kemitraan lintas sektor, dan penguatan kapasitas domestik. Artikel ini merekomendasikan agar diplomasi teknologi dipandang sebagai kompetensi inti kebijakan luar negeri, bukan isu sektoral semata.

Kata kunci: diplomasi digital, diplomasi teknologi, kekuatan lunak, tata kelola siber, kecerdasan buatan, hubungan internasional

Abstract

The rapid development of information and communication technology, artificial intelligence, semiconductors, cloud computing, and cyber infrastructure has transformed how states establish, maintain, and manage diplomatic relations. This article examines technology in two interconnected roles. First, technology as an instrument of diplomacy—a tool utilized by diplomats and ministries of foreign affairs to communicate, project an image, and negotiate national interests. Second, technology as an arena and object of diplomacy—an issue negotiated, contested, and regulated among states through internet governance, semiconductor supply chains, technical standards, cybersecurity, and artificial intelligence governance.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Using a qualitative approach based on a systematic literature review and thematic analysis of selected case studies, this article highlights three key findings. First, while technology expands the reach and speed of diplomacy, it also escalates the risks of disinformation, surveillance, and uncontrolled escalation. Second, technology has emerged as a new source of power; thus, state competition now unfolds through standards, ecosystems, and value chains alongside military might and trade. Third, middle powers and developing nations, such as Indonesia, have opportunities to play significant roles through multilateral diplomacy, cross-sectoral partnerships, and the enhancement of domestic capacity. This article recommends that tech diplomacy be viewed as a core competency of foreign policy rather than a mere sectoral issue.

Keywords: digital diplomacy, technology diplomacy, soft power, cyber governance, artificial intelligence, international relations.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, diplomasi merupakan proses komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mempertahankan hubungan, menyelesaikan perbedaan, serta mencapai kepentingan bersama tanpa mengandalkan kekerasan. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan modern, praktik diplomasi senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada setiap masanya. Kehadiran telegraf pada abad ke-19, memungkinkan komunikasi antara pusat pemerintahan dan perwakilan diplomatik di luar negeri berlangsung lebih cepat. Perkembangan telepon dan telegram kemudian semakin mempercepat penyampaian informasi dan pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Sementara itu, radio dan televisi memperluas ruang diplomasi publik dengan memungkinkan pemerintah menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia berkomunikasi. Teknologi tidak hanya membuat penyampaian informasi menjadi lebih cepat, tetapi juga mengubah siapa saja yang dapat menyampaikan informasi, kepada siapa informasi tersebut ditujukan, serta siapa yang memiliki kendali terhadap sarana dan infrastruktur komunikasi.

Selama dua dekade terakhir, penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, konferensi video, dan teknologi analisis data semakin berkembang dan telah menjadi bagian dari kegiatan diplomatik sehari-hari di berbagai negara. Pemimpin negara dan menteri luar negeri dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat internasional melalui akun resmi mereka, sementara kedutaan besar memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana diplomasi publik. Selain itu, proses perundingan antarnegara juga dapat dilaksanakan secara daring ketika pertemuan secara langsung tidak memungkinkan. Perubahan tersebut semakin terlihat selama pandemi COVID-19, ketika pertemuan tingkat tinggi, forum antarnegara, serta komunikasi bilateral dalam waktu relatif singkat beralih ke ruang virtual.

Perkembangan teknologi dalam diplomasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode atau sarana komunikasi, tetapi juga menjadikan teknologi sebagai bagian penting dari substansi hubungan internasional. Persaingan di bidang industri semikonduktor, kebijakan pembatasan ekspor teknologi canggih, perdebatan tentang penggunaan penyedia jaringan 5G, hingga

pembahasan mengenai aturan perilaku negara di dunia maya menunjukkan bahwa teknologi kini memiliki peran penting dalam hubungan antarnegara. Sejumlah negara bahkan membentuk posisi diplomatik khusus untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah Denmark yang pada 2017 menunjuk seorang “duta teknologi” untuk membangun dan mengelola hubungan dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar yang dinilai memiliki pengaruh global yang semakin menyerupai aktor negara.

Dengan demikian, hubungan antara teknologi dan diplomasi bersifat saling memengaruhi. Di satu sisi, perkembangan teknologi mengubah cara diplomasi dijalankan, termasuk pola komunikasi, negosiasi, dan diplomasi publik. Di sisi lain, diplomasi memiliki peran dalam membentuk aturan, norma, serta mekanisme yang mengatur pengembangan, penggunaan, dan distribusi teknologi di tingkat global. Oleh sebab itu, teknologi dan diplomasi perlu dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam menganalisis dinamika hubungan internasional kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana teknologi berfungsi sebagai instrumen yang mengubah praktik hubungan diplomatik antarnegara?
2. Bagaimana teknologi menjadi arena dan objek diplomasi yang memengaruhi distribusi kekuasaan dan kerja sama internasional?
3. Peluang dan tantangan apa yang dihadapi negara menengah dan negara berkembang, khususnya Indonesia, dalam menavigasi diplomasi berbasis teknologi?

C. Tujuan dan Kontribusi

Artikel ini bertujuan membangun kerangka pemikiran yang menghubungkan dua konsep yang sering dibahas secara terpisah, yaitu diplomasi digital yang menempatkan teknologi sebagai alat dan diplomasi teknologi yang melihat teknologi sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional. Dari sudut pandang akademis, artikel ini membahas kembali berbagai penelitian dan tulisan yang ada di bidang studi diplomasi, hubungan internasional, dan pengelolaan siber. Artikel ini secara praktis memberikan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di luar negeri, khususnya negara-negara yang sedang membangun kemampuan dalam diplomasi teknologi mereka.

D. Sistematika Penulisan

Artikel ini disusun ke dalam enam bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan. Bagian kedua membahas tinjauan pustaka dan kerangka teori. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian. Bagian keempat berisi pembahasan dan analisis. Bagian kelima memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan, implikasi kebijakan, serta keterbatasan penelitian. Daftar pustaka ditempatkan pada bagian terakhir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Diplomasi: Konsep dan Transformasinya

Dalam kajian klasik, diplomasi dipahami sebagai cara mengelola hubungan antarnegara melalui proses negosiasi dan representasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Dalam konteks Indonesia, Djelantik (2008) membahas diplomasi sebagai perpaduan antara teori dan praktik nyata dalam memperjuangkan kepentingan negara.

Sementara itu, Bjola dan Kornprobst (2018) melihat diplomasi secara lebih luas sebagai institusi sosial yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan politik serta teknologi.

Dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi juga tidak lagi terbatas pada hubungan antarpemerintah. Melalui konsep interdependensi kompleks, Keohane dan Nye (1977) menunjukkan bahwa hubungan internasional melibatkan berbagai jalur dan aktor, termasuk aktor nonnegara, serta tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Pandangan tersebut menjadi penting ketika membahas teknologi. Perusahaan teknologi, kelompok ahli teknis, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan individu dapat ikut berperan dalam proses yang berkaitan dengan diplomasi. Hal ini semakin relevan karena sejumlah infrastruktur dan keputusan teknis yang berdampak terhadap hubungan antarnegara justru berada dalam pengelolaan sektor swasta.

B. Kekuatan Lunak, Diplomasi Publik, dan Pergeseran Kekuasaan

Konsep *soft power* dari Nye (2004) menjelaskan kemampuan sebuah negara memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik, bukan paksaan atau bayaran. *Soft power* bersumber dari budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah. Cull (2008) memetakan diplomasi publik ke dalam beberapa fungsi, yakni mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, diplomasi pertukaran, dan siaran internasional. Teknologi digital mempengaruhi semua fungsi tersebut. Media sosial memungkinkan negara mendengarkan opini publik asing secara hampir seketika, sedangkan platform video dan layanan streaming memperluas jangkauan diplomasi budaya.

Nye (2011) selanjutnya menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dunia mengalami dua bentuk perubahan, yaitu perpindahan kekuasaan antarnegara dan penyebaran kekuasaan dari negara menuju aktor nonnegara. Teknologi informasi menjadi salah satu pendorong utama proses tersebut. Dalam kerangka ini, kemampuan siber, penguasaan data, serta kendali terhadap platform digital dapat menjadi sumber kekuasaan baru. Sumber daya tersebut dapat mendukung *soft power*, tetapi juga dapat berkaitan dengan bentuk kekuatan lain, termasuk *sharp power* dan *hard power*.

C. Diplomasi Digital: Teknologi sebagai Instrumen

Kajian mengenai diplomasi digital berkembang pesat sejak akhir dekade 2000-an. Westcott (2008) menjadi salah satu penulis awal yang membahas dampak internet terhadap hubungan internasional. Hocking dan Melissen (2015) dalam penelitiannya untuk Clingendael menyatakan bahwa teknologi digital memengaruhi cara pekerjaan diplomat dilakukan, tetapi tetap diperlukan pertemuan langsung dalam diplomasi. Bjola dan Holmes (2015) membuat kerangka teori yang menggabungkan cara menggunakan teknologi digital dengan gagasan tentang diplomasi, serta membedakan antara perubahan dalam alat yang digunakan dan perubahan dalam cara hubungan antar pihak. Adesina (2017) menyatakan bahwa media sosial memberi kesempatan bagi negara berkembang untuk menyampaikan suaranya, meskipun perbedaan dalam kemampuan masih terasa besar.

Manor (2019) menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar persoalan menggunakan perangkat baru. Digitalisasi juga memengaruhi norma, struktur organisasi, dan budaya dalam kementerian luar negeri. Penggunaan teknologi dapat menghadapi hambatan yang berasal dari budaya organisasi, misalnya ketegangan antara tuntutan transparansi media sosial dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan dalam diplomasi. Sandre (2015) mendokumentasikan bagaimana diplomat memanfaatkan Twitter untuk membangun hubungan dan menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.

Selain membicarakan peluang, buku ini juga membahas sisi negatif dari diplomasi digital. Bjola, Cassidy, dan Manor (2019) membahas bagaimana disinformasi dan propaganda yang dilakukan dengan komputer dapat mengacaukan komunikasi antar pihak secara umum, serta bagaimana kementerian luar negeri harus membangun cara yang tepat untuk menyikapi berita palsu tersebut. Castells (2008) menjelaskan adanya ruang publik baru yang terbentuk karena jaringan komunikasi global, di mana pemerintah negara berusaha bersaing dengan berbagai suara yang tidak berasal dari negara dalam memengaruhi pendapat masyarakat

D. Diplomasi Siber dan Tata Kelola Internet

Bidang lain dalam literatur adalah diplomasi siber, yaitu penggunaan instrumen dan pendekatan diplomatik untuk menghadapi persoalan yang muncul di ruang siber. Barrinha dan Renard (2017) menyatakan bahwa diplomasi siber muncul karena ruang siber menyebabkan masalah keamanan dan pengelolaan yang melintasi batas negara, dan masalah tersebut tidak bisa diatasi sendirian oleh satu pihak saja. Riordan (2019) menjelaskan cara diplomasi siber bekerja, yaitu melalui negosiasi tentang aturan, upaya memperkuat kepercayaan, serta kerjasama dalam menerapkan hukum.

Kello (2017) membahas bagaimana senjata siber memengaruhi pemahaman tradisional mengenai deterensi dan perang. Segal (2016) menunjukkan bahwa persaingan politik antarnegara juga semakin memasuki ruang siber melalui kegiatan spionase, serangan, serta perebutan kendali terhadap aturan internet. Dalam bidang hukum, Schmitt (2017) melalui *Tallinn Manual 2.0* menjelaskan penerapan hukum internasional yang telah ada terhadap operasi siber. Kajian tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan norma diplomatik. Kurbalija (2016) membahas tata kelola internet dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, standar, ekonomi digital hingga hak asasi manusia. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan banyak pihak yang melibatkan pemerintah, perusahaan, komunitas teknis, dan masyarakat sipil.

E. Teknologi, Geopolitik, dan Kedaulatan Digital

Cabang ketiga memandang teknologi sebagai sesuatu yang bersaing dalam persaingan antar negara-negara besar. Bremmer (2021) memperkenalkan istilah “momen teknopolar” untuk menggambarkan keadaan ketika perusahaan teknologi besar mulai memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sebelumnya lebih banyak dimiliki oleh pemerintah. Kondisi ini membuat hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi ikut memengaruhi persaingan kekuasaan dalam hubungan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai persoalan, seperti pemilihan perusahaan penyedia jaringan 5G, pengaturan ekspor komponen semikonduktor berteknologi tinggi, serta kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dari berbagai persoalan tersebut, terlihat bahwa kepentingan ekonomi, keamanan negara, dan hubungan antarnegara saat ini semakin berkaitan satu sama lain dan tidak mudah untuk dipisahkan.

Konsep kedaulatan digital dan kedaulatan data juga muncul sebagai respons terhadap hal tersebut. Negara berusaha memastikan cara pengelolaan data warga negara dan infrastruktur digital, misalnya dengan membuat aturan untuk melindungi data serta menetapkan persyaratan penyimpanan data di dalam negeri. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan adanya aturan yang berbeda-beda, yang akhirnya menjadi topik yang dibahas dalam negosiasi diplomatik

F. Kerangka Teoretis

Artikel ini menggunakan tiga pendekatan teoretis yang saling melengkapi.

Pertama, interdependensi kompleks (Keohane & Nye, 1977). Lensa ini membantu menjelaskan mengapa teknologi membuat hubungan yang saling bergantung, dan bagaimana ketergantungan itu bisa jadi sumber kerja sama sekaligus kelemahan yang bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk menekan.

Kedua, soft power dan diplomasi publik (Nye, 2004; Cull, 2008). Lensa ini digunakan untuk menganalisis teknologi sebagai cara memperkuat citra, legitimasi, dan daya tarik sebuah negara.

Ketiga, konstruktivisme. Wendt (1999) menekankan bahwa struktur dalam hubungan internasional terbentuk karena adanya gagasan, identitas, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh berbagai pihak. Lensa ini cocok untuk memahami cara negara-negara berinteraksi dalam isu norma di bidang siber dan kecerdasan buatan, karena aturan tentang cara berperilaku di dunia digital masih dalam proses penyelesaian dan terus dibicarakan oleh berbagai pihak.

Dari kerangka tersebut, artikel ini mengusulkan perbedaan analitis berikut.

Tabel 1. Perbedaan analitis teknologi sebagai instrumen dan sebagai arena diplomasi

Dimensi	Teknologi sebagai instrumen	Teknologi sebagai arena/objek
Fokus	Cara diplomasi dijalankan	Isu yang didiplomasikan
Contoh	Media sosial, rapat virtual, analitik data	Standar 5G, kontrol ekspor chip, norma siber, tata kelola AI
Aktor utama	Kementerian luar negeri, diplomat, kedutaan	Negara, perusahaan teknologi, lembaga standar, organisasi internasional
Risiko	Disinformasi, kebocoran, ketimpangan kapasitas	Fragmentasi, ketergantungan, perlombaan teknologi
Landasan teori	<i>Soft power</i> , diplomasi publik	Interdependensi, konstruktivisme, geopolitik

G. Celah Penelitian

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa literatur tentang diplomasi digital, diplomasi siber, dan geopolitik teknologi berkembang dalam jalur yang hampir terpisah. Penelitian tentang diplomasi digital biasanya fokus pada penggunaan media sosial dan komunikasi kepada masyarakat umum, penelitian siber lebih menekankan pada keamanan dan hukum internasional, sementara penelitian geopolitik teknologi lebih menyoroti persaingan antar kekuatan besar. Sedikit penelitian yang menghubungkan ketiganya dalam satu kerangka kerja, terutama dari perspektif negara menengah dan negara berkembang yang memiliki kapasitas dan posisi tawar yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara besar.

Selain itu, sebagian besar buku dan artikel ditulis dengan latar belakang negara-negara maju, sehingga pengalaman negara-negara berkembang di Asia Tenggara masih kurang tercatat secara rapi dan terorganisir. Artikel ini mencoba mengisi kekurangan tersebut dengan menawarkan perbedaan antara teknologi sebagai alat dan sebagai tempat, serta menempatkan Indonesia dan ASEAN sebagai salah satu fokus dalam analisis.

3. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka (*literature review*) yang dipadukan dengan studi kasus komparatif secara terbatas. Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian berkaitan dengan makna, proses, dan relasi kekuasaan yang tidak dapat direduksi menjadi angka. Tinjauan pustaka dilakukan dengan prinsip yang dijelaskan Snyder (2019), yaitu tinjauan semi-sistematis atau naratif yang sesuai bagi topik lintas disiplin yang berkembang cepat dan tersebar di berbagai bidang.

B. Sumber Data

Data bersifat sekunder dan terdiri atas empat kelompok sumber:

1. **Literatur akademik:** buku dan artikel jurnal tentang diplomasi digital, diplomasi siber, *soft power*, dan geopolitik teknologi.
2. **Dokumen kebijakan dan hukum internasional:** deklarasi, laporan, dan kerangka kerja yang diterbitkan organisasi internasional dan pemerintah, seperti Deklarasi Bletchley (2023) dan dokumen *Global Digital Compact* di bawah naungan PBB (2024).
3. **Laporan lembaga kajian:** studi dari lembaga seperti Clingendael dan Brookings tentang praktik diplomasi digital.
4. **Pemberitaan dan dokumentasi kasus:** untuk melengkapi konteks peristiwa kontemporer, dengan kehati-hatian dalam memverifikasi informasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian pustaka dilakukan melalui basis data akademik dan repositori institusi menggunakan kata kunci seperti "digital diplomacy", "technology diplomacy", "cyber diplomacy", "tech diplomacy", "digital sovereignty", "AI governance", beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Kriteria inklusi mencakup relevansi dengan topik, kredibilitas penerbit atau penulis, dan kontribusi konseptual atau empiris. Sumber yang bersifat opini tanpa dasar bukti disisihkan.

D. Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan langkah: (1) membaca dan menandai materi, (2) mengodekan gagasan kunci, (3) mengelompokkan kode menjadi tema, (4) meninjau dan menamai tema, dan (5) menyusun narasi analitis. Tema yang muncul dikelompokkan sesuai perbedaan teknologi sebagai instrumen dan teknologi sebagai arena. Studi kasus dipilih secara purposif berdasarkan keragaman jenis dan relevansinya, yakni (a) Denmark dan diplomasi terhadap perusahaan teknologi, (b) Estonia dan diplomasi kedaulatan data, (c) persaingan standar dan rantai pasok semikonduktor antara kekuatan besar, (d) tata kelola kecerdasan buatan dalam forum multilateral, dan (e) posisi Indonesia dan ASEAN.

E. Validitas dan Keterbatasan

Untuk menjaga kualitas, artikel ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur akademik dengan dokumen kebijakan dan laporan lembaga kajian. Keterbatasan penelitian meliputi ketiadaan data primer seperti wawancara dengan diplomat, sifat topik yang berubah cepat sehingga sebagian informasi dapat usang, dan keterbatasan generalisasi dari studi kasus yang dipilih. Pembaca disarankan memperbarui data kasus dengan perkembangan terbaru.

4. DISCUSSION (PEMBAHASAN)

A Teknologi sebagai Instrumen Diplomasi

1. Komunikasi Langsung dan Diplomasi Publik

Perubahan paling kasatmata adalah cara negara berkomunikasi. Kementerian Luar Negeri, kedutaan, dan pejabat tinggi kini dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat luar negeri tanpa melalui media tradisional. Dalam kerangka kerja Cull (2008), fungsi mendengarkan menjadi lebih efektif karena opini publik bisa diawasi, sedangkan fungsi advokasi jadi lebih cepat karena pesan bisa disebar dengan hampir segera. Diplomasi yang sebelumnya bersifat tertutup dan hanya diikuti oleh kelompok elit kini menjadi lebih terbuka dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.

Namun keterbukaan ini menimbulkan dilema. Diplomasi lama memakai rahasia dan kata-kata yang disusun dengan hati-hati, sedangkan media sosial memerlukan kecepatan dan gaya yang lebih singkat. Pesan yang terlalu cepat atau terlalu langsung bisa menyebabkan masalah dalam hubungan diplomatik. Manor (2019) menjelaskan bahwa tantangan ini terkait dengan struktur lembaga, karena kementerian luar negeri perlu mempertahankan pengendalian terhadap pesan sambil tetap memberi kebebasan kepada duta di lapangan. Secara lain, diplomat perlu memiliki keterampilan baru, seperti kemampuan memahami dunia digital, mampu membaca cara kerja algoritma, serta mampu mengelola informasi yang mengalami krisis, selain kemampuan negosiasi yang sudah biasa.

2. Negosiasi, Pertemuan Virtual, dan Efisiensi

Konferensi video dan platform kerja sama membantu mengurangi biaya serta kesulitan dalam mengatur proses diplomasi. Pertemuan dua pihak dan rapat kelompok besar bisa diadakan tanpa harus bepergian, yang sangat membantu negara dengan dana terbatas dan tim delegasi yang kecil. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa banyak tugas dalam diplomasi masih bisa dilakukan secara daring. Meski begitu, Hocking dan Melissen (2015) mengingatkan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan nilai pertemuan secara langsung. Kepercayaan, tanda-tanda nonverbal, dan diplomasi koridor, seperti percakapan santai di antara sesi formal, sulit dilakukan secara online. Negosiasi yang sensitif biasanya masih membutuhkan pertemuan langsung, sehingga model yang mulai berkembang adalah kombinasi antara online dan offline.

3. Data, Analitik, dan Pengambilan Keputusan

Analitik data dan alat berbasis kecerdasan buatan mulai digunakan untuk mengawasi media, menganalisis perasaan masyarakat, mengidentifikasi jaringan pengaruh, serta membantu dalam memperkirakan kebijakan yang akan diambil. Bjola dan Holmes (2015) menyatakan bahwa kemampuan analitis dapat membantu dalam diplomasi yang didasarkan pada bukti. Di sisi lain, penggunaan data besar menimbulkan pertanyaan tentang etika dan hukum, seperti privasi, bias dalam algoritma, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kementerian luar negeri harus menentukan aturan penggunaan alat-alat tersebut agar tidak melanggar norma-norma yang sebenarnya ingin mereka promosikan.

4. Diplomasi Konsuler dan Pelayanan Warga

Analitik data dan alat berbasis kecerdasan buatan mulai dipakai untuk mengawasi media, menganalisis perasaan masyarakat, mengenali jaringan pengaruh, serta membantu dalam mengupas kebijakan yang nantinya akan diambil. Bjola dan Holmes (2015) mengatakan bahwa kemampuan berpikir secara analitis bisa membantu dalam diplomasi yang didasarkan pada fakta dan bukti. Di sisi lain, penggunaan data besar memicu pertanyaan mengenai etika dan

hukum, misalnya soal privasi, bias dalam algoritma, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kementerian luar negeri perlu menetapkan pedoman penggunaan alat-alat tersebut agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang sebenarnya ingin mereka sampaikan.

5. Sisi Gelap: Disinformasi, Pengawasan, dan Kerentanan

Instrumen digital membawa risiko. Disinformasi dan upaya pengaruh bisa menargetkan opini masyarakat dan merusak citra negara, seperti yang diulas oleh Bjola, Cassidy, dan Manor (2019). Duta besar dan lembaga diplomatik juga sering menjadi korban dari penyadapan siber dan serangan peretas, sehingga memastikan keamanan komunikasi dalam diplomasi menjadi isu yang sangat penting secara strategis. Selain itu, perbedaan kapasitas membuat negara yang memiliki lebih banyak sumber daya bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik, sehingga berisiko memperlebar jarak dalam diplomasi antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, teknologi sebagai alat memiliki sifat dua sisi dan hasilnya sangat ditentukan oleh kemampuan, pengelolaan, serta strategi yang digunakan.

B. Teknologi sebagai Arena dan Objek Diplomasi

1. Dari Instrumen ke Substansi: Munculnya Diplomasi Teknologi

Jika diplomasi digital menjawab pertanyaan "bagaimana teknologi membantu diplomasi", maka diplomasi teknologi menjawab pertanyaan "bagaimana diplomasi menghadapi teknologi". Pergeseran ini terjadi karena teknologi memiliki dampak yang memengaruhi berbagai negara, dan tidak bisa dikelola hanya oleh satu negara saja. Contohnya meliputi aliran data, standar teknis, keamanan dalam rantai pasok, serta dampak sosial dari kecerdasan buatan. Dalam hubungan yang saling tergantung secara kompleks, teknologi membentuk keterhubungan yang kuat, sekaligus ketergantungan yang tidak seimbang, yang bisa digunakan sebagai cara memengaruhi.

2. Studi Kasus 1: Denmark dan Diplomasi terhadap Perusahaan Teknologi

Pada tahun 2017, Denmark mengangkat seorang duta besar khusus untuk teknologi yang berbasiskan di Silicon Valley dan juga aktif di kota-kota lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar diakui mempunyai pengaruh sosial, ekonomi, dan politik yang sama besar dengan negara-negara tertentu. Inisiatif ini menunjukkan bahwa diplomasi semakin berkembang dari hubungan antar negara ke hubungan antara negara dan perusahaan. Dari segi teori, ini mendukung gagasan Bremmer (2021) mengenai momen teknopolar dan juga konsep difusi kekuasaan yang diajukan Nye (2011). Pelajaran bagi negara lain adalah bahwa diplomasi harus melibatkan aktor swasta secara sistematis, dengan tugas yang jelas dan keahlian teknis yang cukup.

3. Studi Kasus 2: Estonia dan Diplomasi Kedaulatan Data

Estonia, sebuah negara yang memiliki tingkat digitalisasi pemerintahan yang sangat tinggi, mengalami serangan siber besar pada tahun 2007 yang menunjukkan bagaimana negara yang bergantung pada layanan digital bisa rentan terhadap serangan cyber. Sejak saat itu, Estonia membangun diplomasi siber dan sistem ketahanan digital, termasuk konsep "kedutaan data", yang merupakan penyimpanan salinan data penting negara di luar wilayahnya dan dilindungi oleh hukum diplomatik. Kesepakatan dengan Luksemburg menjadi contoh bagaimana instrumen hukum diplomatik tradisional, seperti kekebalan dan perlindungan fasilitas, digunakan untuk mengatasi isu-isu terkait kedaulatan digital. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa negara-negara kecil bisa memimpin inovasi di bidang diplomatik dengan memanfaatkan spesialisasi, reputasi, dan jaringan kerja sama, seperti dalam pembentukan pembicaraan

hukum internasional tentang siber, salah satunya adalah Tallinn Manual (Schmitt, 2017).

4. Studi Kasus 3: Persaingan Standar, 5G, dan Semikonduktor

Persaingan teknologi antara negara-negara besar menunjukkan sisi paling keras dari diplomasi teknologi. Perdebatan mengenai penyedia peralatan jaringan 5G membuat banyak negara terkena tekanan diplomatik dalam memilih pemasok yang dianggap aman bagi kepentingan nasional. Kebijakan pengendalian ekspor untuk semikonduktor canggih dan peralatan pembuatannya, serta program subsidi bagi industri chip seperti CHIPS and Science Act di Amerika Serikat tahun 2022, menunjukkan bahwa kebijakan industri dan kebijakan luar negeri semakin bersatu. Di tingkat transatlantik, pembentukan Dewan Perdagangan dan Teknologi Amerika Serikat-Uni Eropa pada tahun 2021 adalah langkah yang diambil oleh sekutu untuk menyamakan pendekatan dalam hal standar, rantai pasok, dan teknologi baru.

Dalam kerangka kerja Keohane dan Nye (1977), situasi ini menunjukkan bagaimana ketergantungan satu sama lain dapat diperkuat. Titik-titik kunci dalam rantai pasok, seperti pembuatan chip canggih dan perangkat lunak desain, menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan. Dampaknya bagi negara ketiga adalah situasi sulit: mencari akses teknologi dan investasi dari berbagai pihak sekaligus berusaha tidak ikut terlibat dalam persaingan teknologi antar blok yang saling bertentangan. Standar teknis juga menjadi tempat persaingan karena siapa yang menentukan standar biasanya mendapatkan keuntungan komersial dan strategis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

5. Studi Kasus 4: Tata Kelola Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan membawa peluang ekonomi tetapi juga berbagai risiko, seperti bias, pemantauan yang berlebihan, penyebaran informasi palsu, dan penggunaan dalam konteks militer. Respons diplomatiknya bergerak cepat dan berlapis. Pada November 2023, Inggris mengadakan KTT Keselamatan AI di Bletchley Park yang menghasilkan deklarasi bersama dari beberapa negara mengenai risiko dari teknologi AI terbaru. Di tingkat PBB, Global Digital Compact diterima pada 2024 sebagai bagian dari Pact for the Future, yang berisi komitmen mengenai kerja sama di bidang digital dan pengelolaan kecerdasan buatan. Selain itu, berbagai kerangka hukum regional dan nasional, seperti aturan AI di Uni Eropa, menunjukkan perbedaan cara pendekatan dalam regulasi, yaitu pendekatan berbasis risiko, pendekatan berbasis inovasi, serta model yang menekankan pengendalian oleh negara.

Dari perspektif konstruktivisme (Wendt, 1999), proses ini menunjukkan bahwa aturan atau norma dalam mengelola AI masih sedang dalam proses pembentukan. Negara-negara berebut menentukan bahasa yang digunakan, definisi risiko, dan lembaga resmi yang bertanggung jawab mengurus isu tersebut. Bagi negara yang sedang berkembang, tantangannya adalah memastikan bahwa aturan global tidak hanya mewakili kepentingan negara-negara yang mengembangkan teknologi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pembangunan, akses, dan perlindungan hak rakyatnya.

6. Norma Siber dan Keamanan Internasional

Dalam bidang keamanan siber, diplomasi dilakukan melalui forum PBB seperti Kelompok Ahli Pemerintah (GGE) dan Kelompok Kerja Terbuka (OEWG) yang membahas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara secara bertanggung jawab di lingkungan siber. Prinsip yang sering dibicarakan adalah bahwa hukum internasional berlaku di ruang siber dan aturan yang disepakati bersama, termasuk larangan untuk menyerang infrastruktur yang penting. Barrinha dan Renard (2017) serta Riordan (2019) menjelaskan bahwa proses ini berjalan perlahan dan banyak mengalami perbedaan pendapat, khususnya mengenai pemahaman tentang kedaulatan dan perlunya membuat perjanjian yang mengikat. Perbedaan ini menunjukkan adanya

persaingan nilai, yaitu antara pendekatan yang mengutamakan internet yang terbuka dan melibatkan banyak pihak, serta pendekatan yang lebih menekankan kekuasaan negara dan pengendalian informasi (Segal, 2016; Kurbalija, 2016).

7. Infrastruktur Fisik dan Digital: Kabel Bawah Laut, Pusat Data, dan Komputasi Awan

Selain soal standar dan kecerdasan buatan, diplomasi teknologi juga terkait dengan infrastruktur fisik yang biasanya tidak diperhatikan masyarakat. Sebagian besar data internasional mengalir lewat kabel serat optik di bawah laut, bukan melalui satelit. Lokasi pemasangan kabel, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana jalurnya dijaga merupakan hal yang penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan negara. Pusat data dan layanan komputasi awan, yang mayoritas dioperasikan oleh beberapa perusahaan besar di dunia, menambahkan lapisan ketergantungan baru karena data pemerintah dan warga negara disimpan serta diolah di infrastruktur yang berada di bawah wilayah hukum yang berbeda.

Dari sudut pandang diplomasi, infrastruktur ini memicu beberapa pertanyaan. Siapa yang berhak melihat data yang disimpan di negara lain? Bagaimana cara negara melindungi bangunan penting yang melewati laut internasional? Bagaimana cara negara bekerja sama dengan penyedia swasta tanpa kehilangan kontrol atas data strategis? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong terbentuknya perjanjian bilateral, kerangka kerja sama dalam penegakan hukum lintas batas, serta standar keamanan yang dibicarakan dalam berbagai forum. Dalam hubungan saling tergantung yang rumit, infrastruktur menjadi bukti nyata hubungan antar negara sekaligus titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, negara yang ingin mempertahankan otonominya harus melihat diplomasi infrastruktur digital sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, bukan hanya urusan teknis para penyelenggara layanan telekomunikasi.

8. Diplomasi Pembangunan Kapasitas dan Kesenjangan Digital

Dimensi lain dari diplomasi teknologi adalah kerja sama dalam pembangunan. Negara-negara maju dan organisasi internasional memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan dana untuk meningkatkan infrastruktur serta kemampuan digital di negara-negara yang masih berkembang. Kerja sama ini bisa membantu mengurangi kesenjangan digital, tetapi juga bisa menjadi jalur pengaruh karena teknologi yang digunakan sering kali membuat penerima terikat pada suatu ekosistem, baik dalam perangkat keras, perangkat lunak, maupun standar. Dengan menggunakan pendekatan lensa soft power seperti yang dijelaskan oleh Nye (2004), bantuan teknologi dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun daya tarik yang berlangsung dalam jangka panjang. Namun, menurut pendekatan lensa interdependensi, bantuan tersebut bisa menimbulkan ketergantungan yang mengikuti jalur tertentu, dan hal ini sulit untuk diubah.

Bagi negara yang menerima, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara manfaat yang didapat sekarang dengan kebebasan yang bisa diperoleh di masa depan. Praktik yang baik melibatkan transparansi dalam proses pembelian, penggunaan standar terbuka yang memudahkan kerja sama antar sistem, serta transfer pengetahuan yang nyata agar kemampuan lokal terus berkembang. Diplomat yang mengurus kerja sama pembangunan harus memahami aspek teknisnya agar perjanjian yang dibuat tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang menyediakan barang atau jasa.

C. Posisi Negara Menengah dan Berkembang: Indonesia dan ASEAN

1. Peluang

Negara menengah memiliki beberapa kelebihan dalam hal diplomasi teknologi. Pertama, mereka bisa menjadi jembatan antar pihak karena tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Kedua, mereka bisa menggunakan forum internasional untuk memperkuat suara mereka dengan

membuat koalisi bersama. Ketiga, ukuran pasar digital yang besar memberikan kekuatan dalam bernegosiasi. Indonesia memiliki banyak orang yang menggunakan internet dan ekonomi berbasis teknologi yang semakin berkembang, sehingga menjadi pilihan menarik untuk bekerja sama dan berinvestasi dalam bidang teknologi.

Di dalam penerapannya, Indonesia sudah memanfaatkan platform multilateral untuk membahas isu digital, seperti pada masa kepemimpinan G20 tahun 2022 yang menjadikan transformasi digital sebagai salah satu fokus utama, serta masa kepemimpinan ASEAN tahun 2023. Di tingkat ASEAN, negosiasi kerangka kerja ekonomi digital yang disebut Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menunjukkan upaya untuk menyelaraskan aturan yang berlaku lintas negara terkait pengelolaan data, perdagangan digital, dan transaksi pembayaran. Pendekatan ASEAN yang fokus pada pusat kekuasaan dan sikap netral dapat menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan teknologi antar kekuatan besar, meskipun perlu memverifikasi informasi terbaru dari sumber resmi.

2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi mencakup beberapa hal. Pertama, perbedaan kemampuan teknis dan tenaga kerja diplomat dalam menangani isu teknologi yang semakin rumit. Kedua, tergantung pada teknologi dan infrastruktur dari luar negeri, seperti perangkat keras, layanan komputasi awan, hingga platform global, yang membatasi kebebasan dalam menentukan kebijakan. Ketiga, koordinasi dalam negeri antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga keamanan siber, sektor swasta, serta akademisi sering kali tidak terpadu dan terpecah-pecah. Keempat, tekanan geopolitik mendorong negara memilih sisi teknologi tertentu, padahal kepentingan nasional membutuhkan keseimbangan dalam akses teknologi.

Dalam kerangka interdependensi yang rumit, kerentanan ini memiliki sifat yang tidak seimbang. Negara yang hanya mempercayai satu pemasok lebih mudah terpengaruh tekanan, sedangkan negara yang memilih banyak mitra memiliki kesempatan untuk bergerak lebih luas. Diversifikasi, meskipun penting, membutuhkan upaya diplomasi yang aktif dan kemampuan lokal yang cukup.

3. Strategi yang Dapat Dipertimbangkan

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan oleh negara seperti Indonesia.

Penguatan kapasitas diplomat teknologi. Kementerian Luar Negeri harus membuat program pembelajaran, pelatihan, dan jalan karier bagi diplomat yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi. Contoh dari Denmark menunjukkan betapa pentingnya memiliki mandat dan kehadiran di tengah pusat inovasi.

Diplomasi multilateral dan koalisi. Karena pengaruh dari individu terbatas, negara menengah bisa membentuk koalisi di ASEAN, G20, dan PBB untuk mendukung tujuan bersama, seperti akses teknologi yang adil, pembangunan kemampuan digital, dan perlindungan data lintas batas.

Pendekatan multipihak. Mengikuti model pengelolaan yang dibahas oleh Kurbalija (2016), diplomasi teknologi seharusnya melibatkan perusahaan, komunitas teknis, dan masyarakat sipil dalam membentuk pendirian kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut lebih informatif dan bisa diterima oleh banyak pihak.

Diversifikasi kemitraan dan hedging teknologi. Bekerja sama dengan banyak mitra dalam bidang investasi, penelitian, dan distribusi membantu mengurangi risiko menjadi terlalu bergantung pada satu pihak saja. Diplomasi ekonomi dan diplomasi teknologi perlu dipadukan.

Kedaulatan digital yang proporsional. Kebijakan seperti perlindungan data pribadi dan keamanan infrastruktur kritis sangat penting, tetapi harus dirancang dengan tepat agar tidak menghambat aliran data yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan tidak menyebabkan fragmentasi yang merugikan.

Pembangunan ketahanan dan literasi. Menghadapi informasi palsu dan serangan siber membutuhkan kemampuan tangguh dari dalam negeri, seperti peningkatan pengetahuan digital masyarakat, keamanan siber pada lembaga diplomatik, serta prosedur komunikasi saat terjadi krisis.

4. Sintesis: Hubungan Dua Arah antara Teknologi dan Diplomasi

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa kedua dimensi teknologi, sebagai alat dan sebagai tempat, tidak bisa berdiri sendiri. Pertama, kemampuan menggunakan alat digital mempengaruhi kemampuan negara dalam mengurus urusan teknologi secara diplomatis. Kementerian luar negeri yang sudah terbiasa menggunakan analisis data dan komunikasi digital lebih mudah memahami isu teknis yang dibicarakan dalam negosiasi. Masalah yang dibicarakan di bidang teknologi, seperti perlindungan data dan informasi palsu, kembali menentukan batas serta etika dalam penggunaan alat digital. Ketiga, keduanya bertemu dalam isu kekuasaan: siapa yang menguasai infrastruktur dan platform, maka siapa juga yang memiliki pengaruh terhadap saluran komunikasi dan aliran informasi dalam diplomasi.

Dari segi teori, hasil ini mendukung beberapa pendapat. Teknologi memperkuat hubungan yang saling tergantung karena menambah cara berkomunikasi antar orang sekaligus menciptakan titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Teknologi membantu memperluas pengaruh kekuatan lunak, tetapi daya tarik di dunia digital bisa berkurang karena informasi palsu dan munculnya keraguan. Pada saat yang sama, perkembangan aturan di bidang siber dan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa ide dan identitas memainkan peran penting dalam membentuk cara penyusunan tata kelola, seperti yang dijelaskan oleh teori konstruktivisme. Ketiga lensa itu digunakan bersama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap daripada hanya menggunakan satu sudut pandang saja.

Perlu dicatat pula beberapa batasan argumen. Tidak semua perubahan teknologi itu hebat dan mengubah segalanya, dan beberapa cara dalam diplomasi masih digunakan seperti biasa. Selain itu, beberapa negara dan perusahaan yang mendominasi teknologi tertentu menunjukkan bahwa teknologi sendiri tidak otomatis membuat diplomasi lebih demokratis. Perbedaan dalam akses dan kemampuan bisa memperkuat struktur hierarki yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu menguji secara nyata siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang terlanter akibat transformasi ini.

5. Kerangka Evaluasi bagi Kebijakan Diplomasi Teknologi

Supaya pembahasan di atas bisa digunakan sebagai pedoman dalam praktik, artikel ini memberikan kerangka evaluasi yang sederhana, yang bisa dipakai oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengevaluasi tingkat kesiapan dan keefektifan diplomasi teknologi mereka. Kerangka ini hanya sebagai panduan dan harus disesuaikan sesuai dengan kondisi setiap negara.

Dimensi kapasitas. Dimensi ini mengevaluasi apakah lembaga tersebut memiliki tenaga manusia, dana, serta struktur organisasi yang cukup. Indikatornya meliputi jumlah diplomat

yang mendapat pelatihan mengenai isu teknologi, adanya unit khusus, serta mekanisme pertukaran tenaga dengan sektor swasta dan kalangan akademisi.

Dimensi koordinasi. Dimensi ini mengukur sejauh mana lembaga-lembaga di dalam negeri bekerja sama secara terpadu. Pertanyaan utamanya adalah apakah posisi yang disampaikan oleh delegasi dalam forum internasional itu hasil dari pembicaraan dengan kementerian teknis, lembaga keamanan siber, serta pihak-pihak nonpemerintah yang terkait, dan apakah ada cara penyelesaian jika ada perbedaan kepentingan antarlembaga.

Dimensi pengaruh. Dimensi ini melihat seberapa baik negara bisa menciptakan hasil dari negosiasi internasional. Indikatornya mencakup partisipasi dalam penyusunan teks deklarasi atau standar, memimpin dalam koalisi, serta kemampuan mengangkat isu prioritas nasional menjadi bagian dari agenda forum.

Dimensi ketahanan. Dimensi ini memandang kemampuan negara dalam menghadapi gangguan, seperti serangan siber, informasi palsu, atau tekanan ekonomi yang muncul karena ketergantungan pada teknologi. Indikatornya mencakup tingkat diversifikasi pemasok, keamanan komunikasi diplomatik, serta kesiapan dalam mengelola protokol krisis informasi.

Dimensi legitimasi dan etika. Dimensi ini mengevaluasi apakah penerapan teknologi dalam diplomasi sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Misalnya, penggunaan analisis data untuk mengawasi pandangan publik asing harus mengikuti prinsip perlindungan privasi, sementara pemanfaatan kecerdasan buatan dalam membuat analisis kebijakan perlu diawasi oleh manusia dan memiliki pengakuan yang jelas.

Dengan kerangka ini, evaluasi bisa dilakukan secara berkala, seperti setiap tahun, dan hasilnya dipakai untuk memperbaiki strategi. Pendekatan ini juga memudahkan untuk membandingkan antarnegara, sehingga negara yang sedang membangun kapasitas bisa belajar dari pengalaman negara lain tanpa mengikuti model yang tidak cocok dengan kondisi lokalnya.

5. CLOSING (PENUTUP)

A. Kesimpulan

Artikel ini mengkaji teknologi sebagai bagian integral dari hubungan diplomatik dengan membedakan dua kedudukannya, yaitu instrumen dan arena. Atas pertanyaan penelitian pertama, ditemukan bahwa teknologi mengubah praktik diplomasi dalam komunikasi, negosiasi, analisis, dan pelayanan konsuler. Perubahan ini meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan keterbukaan, tetapi juga memunculkan risiko disinformasi, kerentanan keamanan, dan ketimpangan kapasitas. Diplomasi tatap muka tetap bernilai sehingga praktik yang berkembang bersifat hibrida.

Atas pertanyaan kedua, teknologi telah menjadi arena dan objek diplomasi. Studi kasus Denmark, Estonia, persaingan standar dan semikonduktor, serta tata kelola AI dan siber memperlihatkan bahwa teknologi menjadi sumber daya kekuasaan baru dan wahana kontestasi norma. Interdependensi yang dibawa teknologi dapat menjadi dasar kerja sama, tetapi juga dapat dijadikan alat tekanan. Siapa yang menetapkan standar dan mengendalikan titik simpul rantai pasok memiliki pengaruh yang besar.

Atas pertanyaan ketiga, negara menengah dan berkembang seperti Indonesia menghadapi peluang berupa posisi sebagai jembatan, pasar digital yang besar, dan platform multilateral seperti ASEAN dan G20. Mereka juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas, ketergantungan pada teknologi asing, koordinasi domestik yang terfragmentasi, dan tekanan geopolitik. Strategi yang menjanjikan meliputi penguatan kapasitas diplomat teknologi, koalisi

multilateral, pendekatan multipihak, diversifikasi kemitraan, kedaulatan digital yang proporsional, dan pembangunan ketahanan domestik.

B. Implikasi Kebijakan

Pertama, diplomasi teknologi sebaiknya dilembagakan sebagai kompetensi inti kementerian luar negeri, dengan unit khusus, mekanisme konsultasi dengan sektor swasta dan akademisi, serta pelatihan berkelanjutan. Kedua, kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan siber perlu dikoordinasikan agar posisi negara dalam forum internasional konsisten dengan kebijakan domestik. Ketiga, diplomat perlu pedoman etika dan keamanan dalam penggunaan alat digital dan kecerdasan buatan. Keempat, negara berkembang perlu memperkuat suara kolektif agar aturan global mencerminkan kepentingan pembangunan yang inklusif.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis data sekunder sehingga belum menangkap pengalaman langsung para praktisi. Penelitian selanjutnya dapat memakai wawancara dengan diplomat, analisis dokumen internal yang dapat diakses, atau studi komparatif kuantitatif tentang adopsi alat digital di kementerian luar negeri. Kajian mendalam tentang posisi Indonesia dan ASEAN dalam negosiasi ekonomi digital dan tata kelola AI, serta analisis dampak kebijakan kontrol ekspor terhadap negara ketiga, juga akan memperkaya literatur. Mengingat laju perubahan teknologi, pembaruan data dan peristiwa terbaru sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1297175.
- Barrinha, A., & Renard, T. (2017). Cyber-diplomacy: The making of an international society in the digital age. *Global Affairs*, 3(4-5), 353-364.
- Bjola, C., Cassidy, J., & Manor, I. (2019). Public diplomacy in the digital age. *The Hague Journal of Diplomacy*, 14(1-2), 83-101.
- Bjola, C., & Holmes, M. (Eds.). (2015). *Digital diplomacy: Theory and practice*. Routledge.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2018). *Understanding international diplomacy: Theory, practice and ethics* (2nd ed.). Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bremmer, I. (2021). The technopolar moment: How digital powers will reshape the global order. *Foreign Affairs*, 100(6), 112-128.
- Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 78-93.
- Cull, N. J. (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 31-54.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara teori dan praktik*. Graha Ilmu.
- Hocking, B., & Melissen, J. (2015). *Diplomacy in the digital age*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Kello, L. (2017). *The virtual weapon and international order*. Yale University Press.

- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.
- Kurbalija, J. (2016). *An introduction to internet governance* (7th ed.). DiploFoundation.
- Manor, I. (2019). *The digitalization of public diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2011). *The future of power*. PublicAffairs.
- Riordan, S. (2019). *Cyber diplomacy: Managing foreign policy in the twenty-first century*. Polity Press.
- Sandre, A. (2015). *Twitter for diplomats*. DiploFoundation and Istituto Diplomatico.
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). *Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge University Press.
- Segal, A. (2016). *The hacked world order: How nations fight, trade, maneuver, and manipulate in the digital age*. PublicAffairs.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Westcott, N. (2008). *Digital diplomacy: The impact of the internet on international relations* (Research Report No. 16). Oxford Internet Institute.